

# Implementasi Program BSPS Dalam Merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni Di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam

Agustina Sari<sup>1</sup>, Fitri Eriyanti<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang, Indonesia  
e-mail: [agustinasari002@gmail.com](mailto:agustinasari002@gmail.com)<sup>1</sup>, [fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id](mailto:fitri.eriyanti@fis.unp.ac.id)<sup>2</sup>

**Artikel dikirim:** 28 April 2026; **Revisi:** 17 Mei 2026; **Diterima:** 18 Mei 2026; **Dipublikasikan:** 20 Mei 2026.

## Abstrak

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas rumah masyarakat berpenghasilan rendah melalui pendekatan swadaya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program BSPS dalam merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dengan informan penelitian terdiri dari pemerintah nagari, pendamping program, tukang, penyedia material, serta masyarakat penerima bantuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program BSPS di Nagari Bayua telah berjalan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan, meskipun dalam pelaksanaannya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan dana bantuan yang belum mencukupi kebutuhan perbaikan rumah, keterlambatan dan ketidaksesuaian kualitas material bangunan, keterbatasan tenaga kerja, dan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, faktor cuaca juga turut mempengaruhi kelancaran proses pembangunan. Penelitian ini menegaskan diperlukannya peningkatan koordinasi antar pihak terkait, perbaikan dalam proses sosialisasi, serta penyesuaian besaran bantuan agar lebih sesuai dengan kondisi kerusakan rumah. Dengan demikian, implementasi Program BSPS diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan mampu memberikan manfaat yang optimal bagi Masyarakat.

**Kata kunci:** BSPS, Implementasi, masyarakat berpenghasilan rendah, RTLH

## Abstract

The Self-Help Housing Stimulant Assistance Program (BSPS) is one of the government's efforts to improve the quality of housing for low-income communities through a self-help approach. This study aims to analyze the implementation of the BSPS program in rehabilitating uninhabitable houses (RTLH) and to identify the challenges encountered during its implementation in Nagari Bayua, Tanjung Raya District, Agam Regency. This research employs a descriptive qualitative method, with data collected through interviews, observations, and documentation. The research informants consist of village government officials, program facilitators, construction workers, material suppliers, and beneficiary communities. The results indicate that the implementation of the BSPS program in Nagari Bayua has been carried out in accordance with the established mechanisms. However, several challenges were still encountered, such as insufficient financial assistance to meet the needs of housing rehabilitation, delays and inconsistencies in the quality of building materials, limited labor availability, and a lack of effective socialization to the community. In addition, weather conditions also affected the smooth progress of the construction process. This study emphasizes the need to improve coordination among relevant stakeholders, enhance the socialization process, and adjust the amount of assistance to better match the level of housing damage. Therefore, the implementation of the BSPS program is expected to become more effective and provide optimal benefits to the community.

**Keywords:** BSPS, Implementation, low-income community, RTLH

## 1. PENDAHULUAN

Perumahan yang layak merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Pasal 24 huruf A, disebutkan bahwa Rumah Layak Huni adalah rumah yang memenuhi

persyaratan keselamatan bangunan dan kecukupan minimum luas bangunan serta kesehatan penghuni. Tempat tinggal merupakan wadah bagi seseorang atau keluarga dalam melangsungkan kehidupannya. Tempat tinggal yang layak merupakan salah satu faktor penting bagi seseorang untuk mencapai kesejahteraan. Persoalan kemiskinan merupakan masalah utama yang menjadi hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat yang kurang mampu dan berpenghasilan rendah. Jumlah masyarakat berpenghasilan rendah di Indonesia saat ini masih tergolong tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat pada September 2024 mencapai 24,06 juta orang (BPS, 2025). Sehingga banyak warga masih menempati tempat tinggal yang tergolong Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) akibat keterbatasan ekonomi dan akses terhadap perumahan layak. Hal ini sesuai dengan basis data RTLH Kementerian PUPR, yang mencatat jumlah RTLH Nasional saat ini mencapai 3.829.973 unit (Kementerian PUPR, 2024).

Salah satu cara untuk mengatasi RTLH yakni dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Perumahan dan Penyediaan Rumah Khusus. Berdasarkan peraturan ini Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah dukungan dana pemerintah bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk peningkatan kualitas rumah swadaya berasaskan kegotong-royongan. Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) telah masuk ke dalam salah satu program prioritas Kementerian PUPR dalam menangani permasalahan perumahan dan sebagai bentuk kepedulian terhadap pembenahan tempat tinggal yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Ardiansyah & Prabawati, 2023). Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Adanya program ini sangat membantu masyarakat kurang mampu untuk memperbaiki rumah yang tidak layak huni menjadi rumah layak huni (Yusuf dkk., 2022).

Pada tahun 2024, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat telah melaksanakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di beberapa daerah salah satunya adalah Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, dimana setiap unit rumah memperoleh bantuan senilai Rp20 juta, dengan rincian Rp17,5 juta untuk material bangunan dan Rp2,5 juta untuk upah pekerja. Nagari Bayua merupakan nagari dengan penerima BSPS terbanyak dibandingkan nagari-nagari lainnya di Kecamatan Tanjung Raya yakni sebanyak 145 unit dari sebanyak 173 rumah tidak layak huni. Program BSPS ini didanai oleh APBN dan aspirasi atau Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP) dari Muhammad Iqbal sebagai Wakil Ketua Komisi V DPR RI pada tahun 2024. Besarnya perhatian dan alokasi bantuan BSPS di Nagari Bayua juga tidak terlepas dari adanya aspirasi pembangunan daerah pemilihan (UP2DP) yang diperjuangkan oleh Muhammad Iqbal selaku Wakil Ketua Komisi V DPR RI yang juga berasal dari nagari Bayua.

Tata cara pelaksanaan program BSPS ini diatur dalam Surat Edaran Dirjen Perumahan No.14/SE/Dr/2022 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Bantuan Pembangunan Rumah Swadaya. Dalam pelaksanaannya, bantuan senilai 20 juta rupiah tidak langsung dikelola oleh penerima manfaat. Dana sebesar Rp17,5 juta disalurkan langsung ke toko bangunan yang telah ditunjuk oleh kelompok penerima bantuan sebagai penyedia bahan material, sedangkan sisa Rp2,5 juta diperuntukkan bagi upah pekerja. Namun dalam praktiknya jumlah bantuan tersebut tidak mencukupi baik untuk memenuhi kebutuhan material maupun untuk membayar upah tukang atau pekerja, terutama pada rumah-rumah yang mengalami kerusakan berat. Kondisi ini menyebabkan sebagian penerima manfaat harus menambahkan dana pribadi agar proses rehabilitasi dapat diselesaikan secara optimal. Ketidaksesuaian antara penilaian kerusakan rumah dengan jumlah bantuan yang diberikan kepada setiap penerima bantuan rumah tidak layak huni mengakibatkan rumah penerima bantuan tidak bisa tertutup secara sempurna. Terbatasnya anggaran yang tersedia maka pemerataan besar bantuan untuk setiap rumah atau penerima bantuan diratakan walaupun kerusakan setiap rumah berbeda-beda (Halimah dkk., 2019). Keluhan juga muncul terkait kualitas bahan bangunan yang diterima, seperti seng yang tipis dan berbeda dari penerima manfaat lainnya, batu bata yang rusak, dan kayu atau papan yang kualitasnya tidak sesuai dengan yang diminta oleh penerima.

Permasalahan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan program BSPS di Nagari Bayua adalah adanya unit rumah yang tidak selesai direhabilitasi dengan baik. Salah satu penyebabnya adalah penggunaan bantuan oleh penerima manfaat untuk membangun rumah baru di atas lahan yang berbeda dari data awal, sehingga rumah tersebut tidak dapat dihuni. Kendala yang dihadapi dalam program BSPS ini lebih kepada masyarakat itu sendiri, dimana masyarakat berperan penting dalam kesuksesan program ini. Ada masyarakat yang siap dan tidak siap dalam menerima bantuan BSPS karena program ini merupakan bantuan stimulan atau perangsang yang mengharuskan adanya partisipasi swadaya (Mulyadi, 2020:749). Selain itu, jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Nagari Bayua yang tercatat sebanyak 173 unit tidak sebanding dengan kuota bantuan BSPS yang hanya mencakup 145 unit. Hal ini mengakibatkan sejumlah warga dengan kondisi rumah yang justru lebih memprihatinkan tidak memperoleh bantuan. Kondisi tersebut memunculkan kesan bahwa penetapan penerima bantuan belum sepenuhnya tepat sasaran.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis memutuskan untuk mengadakan penelitian terkait pelaksanaan kegiatan program BSPS dengan judul penelitian "Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Bayua Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam". Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Program BSPS dalam merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan jenis penelitian yang bertujuan untuk memahami suatu fenomena tertentu. Fenomena ini mencakup hal-hal yang dialami oleh subjek penelitian yang kemudian dijelaskan secara menyeluruh melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata yang menggambarkan keadaan sebenarnya. Maka dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk mendeskripsikan dan menggambarkan fenomena terkait program BSPS yang dilaksanakan di Nagari Bayua dalam merehabilitasi rumah warga yang bersumber dari wawancara, observasi, dokumen pribadi maupun dokumen resmi serta catatan lapangan yang dikembangkan berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. berdasarkan penelitian yang akan penulis lakukan maka lokasi penelitian yang dipilih oleh peneliti adalah di Nagari Bayua, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat.

Penentuan informan penelitian dilakukan dengan cara purposive sampling yaitu individu yang memiliki pemahaman serta keterlibatan langsung dengan permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Beberapa pihak yang menjadi informan pada penelitian ini adalah Wali Nagari Bayua, Pekerja Bangunan, Toko Bangunan Penyedia Material, Satuan Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Barat, dan masyarakat penerima BSPS. Keabsahan data dalam penelitian ini diuji menggunakan teknik triangulasi sumber. data di proses melalui beberapa tahap yakni reduksi atau memilah data yang diperoleh dari lapangan agar sesuai dengan fokus penelitian; penyajian data dimana data disajikan kedalam bentuk narasi yang mudah dipahami; hingga tahap penarikan kesimpulan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) merupakan program nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Direktorat Jenderal Perumahan, dengan pelaksanaan teknis di daerah oleh satuan kerja perumahan provinsi. Secara yuridis, program ini berlandaskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman serta Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2022 tentang Pelaksanaan BSPS yang menegaskan bahwa BSPS merupakan bantuan stimulan berbasis swadaya untuk meningkatkan kualitas rumah tidak layak huni.

Keberhasilan implementasi menurut Van Meter dan Van Horn dipengaruhi oleh 6 variabel yakni standar dan sasaran kebijakan; sumber daya, Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksana; karakteristik organisasi pelaksana; disposisi atau sikap pelaksana; dan Kondisi sosial, ekonomi dan politik. Maka pada Implementasi Program BSPS dalam merehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni di Nagari Bayua dijelaskan sebagai berikut:

### **3.1. Standar dan Sasaran Kebijakan**

Van Meter dan Van Horn menegaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kejelasan standar dan tujuan kebijakan yang dirumuskan dalam dokumen resmi. Hal ini juga sejalan dengan pandangan Jeffrey L. Pressman dan Aaron Wildavsky yang menyatakan bahwa implementasi tidak dapat dinilai tanpa adanya tujuan yang jelas sebagai tolok ukur (Van Horn & Van Meter, 1975). Dalam konteks BSPS di Nagari Bayua, standar dan sasaran kebijakan telah ditetapkan secara jelas, yaitu membantu masyarakat berpenghasilan rendah dalam merehabilitasi rumah tidak layak huni melalui pendekatan stimulan. Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman masyarakat terhadap tujuan tersebut masih belum optimal. Sebagian masyarakat menganggap BSPS sebagai bantuan penuh, bukan sebagai stimulan yang mendorong swadaya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara tujuan kebijakan dengan pemahaman kelompok sasaran, sehingga mempengaruhi efektivitas implementasi di lapangan.

### **3.2. Sumber Daya**

Menurut Van Meter dan Van Horn, keberhasilan implementasi kebijakan sangat ditentukan oleh ketersediaan sumber daya, baik sumber daya manusia maupun finansial. Hal ini diperkuat oleh George C. Edwards III (dalam Kadji, 2015) yang menyatakan bahwa sumber daya mencakup staf, informasi, kewenangan, serta fasilitas yang mendukung pelaksanaan kebijakan. Dalam implementasi BSPS di Nagari Bayua, keterbatasan sumber daya menjadi kendala utama. Dana bantuan sebesar Rp20.000.000 dinilai belum mencukupi kebutuhan rehabilitasi rumah, terutama untuk biaya upah tukang. Selain itu, keterbatasan jumlah tenaga kerja menyebabkan keterlambatan pengerjaan karena harus dilakukan secara bergantian. Kondisi ini sejalan dengan temuan Rahmatullah (2023) yang menunjukkan bahwa keberadaan sumber daya orang yang mempunyai, sesuai dengan tuntutan pekerjaan yang ditetapkan oleh kebijakan, serta mampu menjalankan setiap tahap implementasi dengan baik, sangat berpengaruh dalam mencapai kesuksesan implementasi. Selain itu, penelitian Capell (2021) juga menegaskan bahwa kualitas hasil pembangunan sangat dipengaruhi oleh kemampuan swadaya penerima bantuan, ketersediaan material, serta keterlibatan dalam proses pembangunan. Penelitian tersebut juga menjelaskan bahwa penerima manfaat yang tidak dapat berpartisipasi dalam pekerjaan pembangunan akibat keterbatasan waktu dan tuntutan mata pencaharian cenderung mengeluarkan biaya lebih besar, yang pada akhirnya berdampak pada kualitas hasil pembangunan rumah. Dengan demikian, keterbatasan sumber daya dalam BSPS di Nagari Bayua berdampak langsung pada kualitas dan kecepatan pelaksanaan program.

### **3.3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana**

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa komunikasi yang efektif diperlukan agar standar dan tujuan kebijakan dapat dipahami secara seragam oleh para pelaksana. Ketidakefektifan komunikasi berpotensi menimbulkan distorsi dalam implementasi kebijakan. Kejelasan standar dan sasaran serta sumber daya tidak menjamin implementasi yang efektif apabila tidak dibarengi dengan adanya komunikasi antar implementor kebijakan dalam organisasi. Semua implementor kebijakan harus memahami apa yang diidealkan oleh kebijakan, sebab apa yang implementasikan menjadi tanggung jawab para implementor tersebut. Dalam pelaksanaan BSPS di Nagari Bayua, komunikasi antar pelaksana seperti pemerintah nagari, dan pendamping (TFL) telah berjalan cukup baik dalam hal koordinasi teknis. Namun, komunikasi kepada masyarakat masih belum optimal, terutama dalam kegiatan sosialisasi program. Sebagaimana pada penelitian Ardiansyah (2023) bahwa semakin baik komunikasi dan koordinasi yang terbangun di antara para pelaksana pada setiap tahap implementasi kebijakan,

maka kemungkinan timbulnya masalah dapat diminimalkan, sehingga upaya pencapaian tujuan kebijakan menjadi lebih mudah dan terarah. Kurangnya sosialisasi dalam program BPSPS menyebabkan masyarakat tidak memahami konsep swadaya, sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah. Hal ini menunjukkan bahwa variabel komunikasi masih menjadi kelemahan dalam implementasi program.

### **3.4. Karakteristik Organisasi Pelaksana**

Organisasi Pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat dalam implementasi program berdasarkan ciri-ciri yang tepat serta sesuai dengan para agen pelaksananya. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi program perlu juga diperhitungkan saat hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi program maka semakin luas pula agen pelaksana yang terlibat (Buari, 2024). Van Meter dan Van Horn menjelaskan bahwa karakteristik organisasi pelaksana, seperti struktur organisasi, kapasitas teknis, dan pola koordinasi, sangat mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan. Dalam implementasi BPSPS di Nagari Bayua, terdapat berbagai aktor yang terlibat, seperti pemerintah nagari, wali jorong, TFL, serta Kelompok Penerima Bantuan (KPB). Struktur organisasi pelaksana yang melibatkan berbagai pihak ini memberikan keuntungan berupa adanya pengawasan berlapis, namun juga berpotensi menimbulkan hambatan koordinasi apabila tidak dikelola dengan baik. Namun, sebagaimana dijelaskan dalam Pramono (2020) bahwa struktur organisasi yang terlalu berlapis cenderung mengurangi efektivitas pengawasan serta memicu munculnya prosedur birokrasi yang berbelit dan kompleks, sehingga kegiatan organisasi menjadi kurang fleksibel. Hal ini terlihat dari adanya kendala dalam pengadaan bahan bangunan serta distribusi material yang tidak sesuai kebutuhan. Dengan demikian, meskipun struktur organisasi sudah terbentuk, efektivitas koordinasi masih perlu ditingkatkan.

### **3.5. Disposisi atau Sikap Pelaksana**

Van Meter dan Van Horn menekankan bahwa sikap atau disposisi pelaksana sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Pelaksana yang memiliki komitmen dan pemahaman yang baik terhadap tujuan kebijakan akan meningkatkan efektivitas implementasi. Para pelaksana mungkin gagal melaksanakan kebijakan dengan baik karena mereka menolak tujuan-tujuan yang terkandung didalamnya. Sebaliknya penerimaan yang luas terhadap standar dan tujuan kebijakan dipihak mereka yang bertanggung jawab untuk melaksanakannya akan meningkatkan potensi keberhasilan pelaksanaannya. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif (Pramono, 2020). Maka dari itu disposisi atau sikap pelaksana dalam implementasi program harus memiliki sikap kooperatif dan responsif dari pelaksana program mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam proses implementasi. Hal ini memperkuat keberhasilan implementasi program meskipun dihadapkan pada keterbatasan sumber daya.

Dalam program BPSPS di Nagari Bayua, pendamping (TFL) menunjukkan komitmen yang baik dalam menjalankan tugasnya, seperti memberikan arahan teknis dan melakukan pengawasan. Namun, di sisi masyarakat, masih terdapat sikap yang kurang mendukung, terutama dalam hal partisipasi swadaya. Menurut Edwards III (dalam Kadji, 2015), disposisi atau kecenderungan sikap pelaksana dapat dipahami sebagai kemauan serta kesepahaman para pelaksana dalam menjalankan kebijakan, yang pada akhirnya mendorong keberhasilan proses implementasi. Oleh karena itu, rendahnya partisipasi masyarakat menunjukkan bahwa disposisi kelompok sasaran belum sepenuhnya selaras dengan tujuan program.

### **3.6. Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan**

Van Meter dan Van Horn menyatakan bahwa kondisi sosial dan ekonomi masyarakat merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Hal ini juga diperkuat oleh Smith (dalam Van Meter & Van Horn, 1975) yang menekankan bahwa lingkungan eksternal dapat menjadi pendukung atau penghambat implementasi. Kondisi sosial, ekonomi, dan politik

yang tidak kondusif dapat menjadi sumber masalah dari kegagalan kinerja implementasi program. Sebaliknya apabila kondisi ini eksternal ini kondusif akan mampu memberikan efek yang baik dalam pelaksanaan sebuah program (Buari, 2024). Dalam penelitian ini, kondisi ekonomi masyarakat Nagari Bayua yang tergolong rendah menjadi salah satu kendala utama. Keterbatasan kemampuan swadaya menyebabkan masyarakat sangat bergantung pada bantuan pemerintah. Selain itu, faktor lingkungan seperti cuaca juga berpengaruh signifikan. Cuaca buruk, terutama hujan, menghambat proses pembangunan, mempengaruhi kualitas material, serta memperlambat penyelesaian pekerjaan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hetharie (2025) yang menyatakan bahwa cuaca dapat mempengaruhi mobilisasi, produktivitas tenaga kerja, dan ketepatan waktu pelaksanaan proyek konstruksi.



Gambar 1. Hasil Peningkatan Kualitas Rumah BPS Nagari Bayua

Berdasarkan hasil peningkatan kualitas rumah masyarakat penerima BPS di Nagari Bayua dapat dilihat bahwa implementasi Program BPS secara umum telah memberikan dampak positif bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagai kelompok sasaran utama kebijakan ini. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari adanya perubahan kondisi rumah yang sebelumnya tergolong tidak layak huni menjadi rumah yang lebih layak untuk ditempati, baik dari segi struktur bangunan maupun kenyamanan dasar hunian. Namun beberapa diantaranya juga menunjukkan bahwa capaian fisik rehabilitasi rumah belum sepenuhnya merata dan sesuai dengan standar kelayakan yang diharapkan. Peneliti menemukan beberapa rumah yang direhabilitasi masih menggunakan material alternatif, seperti dinding seng yang dipasang sebagai pengganti papan, yang secara kualitas belum sepenuhnya memenuhi standar rumah layak huni. Selain itu, terdapat pula rumah yang secara tampilan luar terlihat sudah baik karena telah dilakukan pengecatan, namun kondisi bagian dalam rumah masih memerlukan perbaikan lebih lanjut, seperti pada bagian lantai, dinding, atau struktur lainnya.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya perbedaan prioritas dalam penggunaan dana bantuan oleh penerima BPS. Penggunaan anggaran untuk pengecatan rumah dinilai kurang tepat apabila dibandingkan dengan kebutuhan perbaikan struktural yang lebih mendesak. Pengecatan rumah seharusnya dapat dilakukan pada tahap lanjutan ketika masyarakat telah memiliki kemampuan swadaya atau dana tambahan di luar bantuan program, sementara dana BPS lebih difokuskan pada pemenuhan aspek-aspek utama kelayakan hunian.

Implementasi Program BPS dalam merehabilitasi rumah tidak layak huni di Nagari Bayua dapat dikatakan berhasil, namun keberhasilan tersebut bersifat relatif. Program ini cenderung berjalan lebih optimal bagi penerima bantuan yang memiliki kesiapan swadaya yang

cukup, baik dari segi finansial maupun dukungan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari adanya perbedaan kualitas hasil rehabilitasi antara rumah penerima bantuan yang memiliki kemampuan swadaya dengan rumah penerima bantuan yang sangat bergantung pada dana program. Dengan demikian, keberhasilan implementasi BSPS sangat dipengaruhi oleh kesiapan dan kemampuan masyarakat penerima bantuan dalam mendukung pelaksanaan rehabilitasi rumah secara mandiri.

#### 4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Nagari Bayua telah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, mulai dari tahap pengusulan, verifikasi, penetapan penerima, pembentukan Kelompok Penerima Bantuan (KPB), hingga pelaksanaan rehabilitasi rumah. Program ini secara umum telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kualitas hunian masyarakat berpenghasilan rendah, khususnya melalui perbaikan komponen utama rumah seperti atap, lantai, dan dinding.

Namun, keberhasilan implementasi program masih bersifat relatif dan belum optimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala utama, antara lain keterbatasan sumber daya, terutama dana bantuan dan tenaga kerja, yang mengharuskan penerima bantuan menambah biaya secara mandiri. Selain itu, kendala teknis seperti ketidaksesuaian kualitas bahan bangunan serta pengiriman material yang tidak lengkap atau tidak berurutan turut menghambat proses rehabilitasi rumah. Dari aspek non-teknis, kurangnya sosialisasi menyebabkan rendahnya pemahaman masyarakat terhadap konsep BSPS sebagai program stimulan berbasis swadaya. Akibatnya, partisipasi masyarakat dalam bentuk kontribusi tenaga, dana, maupun gotong royong masih rendah. Di sisi lain, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terbatas serta faktor eksternal seperti cuaca juga menjadi hambatan dalam pelaksanaan program.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Program BSPS di Nagari Bayua telah berjalan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan melalui penguatan sosialisasi program, peningkatan dukungan sumber daya, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat agar tujuan program sebagai stimulan berbasis swadaya dapat tercapai secara optimal.

Adapun beberapa saran yang dapat penulis berikan berdasarkan temuan dan kesimpulan penelitian ini, yaitu:

1. Peningkatan Sosialisasi dan Pemahaman Program. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat bersama pemerintah nagari perlu meningkatkan kualitas sosialisasi program secara lebih intensif dan partisipatif. Sosialisasi harus menekankan bahwa BSPS merupakan bantuan stimulan berbasis swadaya, sehingga masyarakat memiliki pemahaman yang utuh dan terdorong untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan program.
2. Penyesuaian dan Penguatan Sumber Daya. Pemerintah disarankan melakukan evaluasi terhadap besaran bantuan, khususnya pada komponen upah tukang, serta memastikan ketersediaan tenaga kerja yang memadai. Selain itu, pengawasan terhadap kualitas dan distribusi bahan bangunan perlu ditingkatkan agar sesuai dengan standar dan kebutuhan di lapangan.
3. Penguatan Peran Pendamping (TFL). Tenaga Fasilitator Lapangan perlu terus ditingkatkan kapasitasnya, tidak hanya dalam aspek teknis, tetapi juga dalam pemberdayaan masyarakat. Pendamping diharapkan mampu mendorong partisipasi, memberikan edukasi, serta memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan.
4. Peningkatan Partisipasi dan Swadaya Masyarakat. Masyarakat penerima bantuan diharapkan dapat meningkatkan kontribusi dalam bentuk dana, tenaga, maupun gotong royong. Partisipasi aktif ini penting untuk mendukung keberhasilan program, mengingat

BSPS dirancang sebagai program stimulan yang tidak sepenuhnya membiayai pembangunan rumah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardiansyah, F., & Prabawati, I. (2023). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Dalam Rangka Peningkatan Rumah Layak Huni Di Kabupaten Sidoarjo. *Publika*, 11(4), 2455-2464 <https://doi.org/10.26740/publika.v11n4.p2455-2464>
- Badan Pusat Statistik. (2025). Persentase Penduduk Miskin September 2024. <https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2025/01/15/2401/persentase-penduduk-miskin-september-2024-turun-menjadi-8-57-persen.html>
- Buari, S., Humaizi, & Kusmanto, H. (2024). Implementasi Program Bedah Rumah Tidak Layak Huni di Dinas Perumahan dan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang. *Perspektif*, 13(3), 891-900. <https://doi.org/10.31289/perspektif.v13i3.12250>
- Capell, T., & Ahmed, I. (2021). Improving Post-Disaster Housing Reconstruction Outcomes in the Global South: A Framework for Achieving Greater Beneficiary Satisfaction through Effective Community Consultation. *Buildings*, 11(4). <https://doi.org/10.3390/buildings11040145>
- Hetharie, V. I., & Taihuttu, F. (2025). Analisis Pengaruh Cuaca Dan Mobilisasi Terhadap Waktu Kerja Proyek Konstruksi Jembatan Studi Kasus Provinsi Maluku. *Jurnal Kacapuri: Jurnal Keilmuan Teknik Sipil*, 8(2), 215-227. <https://dx.doi.org/10.31602/jk.v8i2.18253>
- Kadji, Yulianto. (2015). Formulasi Dan Implementasi Kebijakan Publik, Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. Gorontalo: UNG Press.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2024). Basis Data Rumah Tidak Layak Huni. <https://datartlh.perumahan.pu.go.id/main/>
- Mulyadi, A. (2020). Implementasi Kebijakan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Di Kota Sukabumi. *MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 6(4), 744-754
- Pramono, J. (2020). Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik. Surakarta: UNISRI Press.
- Rahmatullah, F. T., & Nasir, B. (2023). Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Di Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. *eJournal Pembangunan Sosial*, 11(2), 34-46
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework: A Conceptual Framework. *Administration & Society*, 6(4), 445-488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Yusuf, A. P., Khaerunnisa, Ramadanti, N. P., Subandi, N. I., & Ramdani, F. T. (2022). Implementasi Kebijakan Program Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni (RS-RTLH) Di Desa Jambuluwuk Kecamatan Ciawi Kabupaten Bogor. *Karimah Tauhid*, 1(3), 289-297. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v1i3.6493>